

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, penelitian tentang analisis pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakan RUU POM telah berhasil mengidentifikasi peran dan posisi pemangku kepentingan serta konflik yang terjadi di antara pemangku kepentingan. Kesimpulan dalam penelitian ini telah mengidentifikasi peran pemangku kepentingan yakni DPR RI berperan sebagai regulator. Kemenkes RI, PB IDI, PP IAI, dan YLKI berperan sebagai koordinator. BPOM RI dan MAKPI berperan sebagai fasilitator. BPOM RI dan GAPMMI berperan sebagai implementor. Sedangkan peran pemangku kepentingan sebagai akselerator tidak dapat ditemukan, karena tidak adanya bukti-bukti yang mendukung pemangku kepentingan sebagai akselerator.

Hasil penelitian juga telah memetakan posisi pemangku kepentingan yang menempatkan DPR RI, Kemenkes RI, dan BPOM RI sebagai *key players*. PB IDI, PP IAI, dan YLKI sebagai *context setter*. GAPMMI sebagai *subjects*. MAKPI sebagai *crowds*. Penelitian ini juga menemukan adanya konflik kepentingan yang terjadi di antara Kemenkes RI dan BPOM RI terkait dengan pembagian wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Hal tersebut juga berimbas terhadap proses perumusan RUU POM dengan adanya potensi dihapusnya dua direktorat di bawah Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI apabila RUU POM disahkan.

Hasil penelitian juga menemukan masih banyaknya kasus terhadap pelanggaran obat dan makanan yang telah merugikan masyarakat secara luas terkhusus dari segi kesehatan masyarakat. Kasus pelanggaran yang sering terjadi adalah produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, telah melewati masa kedaluwarsa, dan juga peredaran obat dan makanan ilegal. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi pengawasan obat dan makanan saat ini belum terlaksana secara optimal dan baik. Perlu sosialisasi secara masif dan efektif untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha dan masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan. Sehingga para pengusaha dapat mematuhi aturan dengan taat, dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan.

Hasil penelitian juga mendapatkan pandangan terkait praktik lobi yang terjadi di parlemen berlangsung secara tak kasat mata, namun tampak pada fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu, keseriusan DPR RI di dalam perumusan RUU POM masih belum optimal dengan minimnya jadwal pembahasan RUU POM di Badan Legislasi DPR RI, sehingga proses pembahasan RUU POM mengalami penundaan. Hasil penelitian yang terakhir menemukan belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan di luar lembaga negara secara aktif dan masif di dalam perumusan RUU POM, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat terhadap proses pembahasan RUU POM belum nampak secara jelas.

## 5.2. Implikasi

Merujuk kepada kesimpulan hasil penelitian, maka untuk mengoptimalkan pembentukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan dan juga kebijakan lainnya perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Meningkatkan keseriusan DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI dalam pembentukan RUU POM dengan menjadwalkan secara pasti rapat harmonisasi RUU POM.
- 2) Mendudukkan secara bersama antara Kemenkes RI dan BPOM RI dalam pembahasan RUU POM untuk menemukan titik tengah di antara dua lembaga terkait pembagian wewenang.
- 3) Menguatkan peran dan pengaruh pemangku kepentingan di luar pemerintahan untuk mengawal pembahasan RUU POM melalui pelibatan lembaga masyarakat atau profesi seperti YLKI, PB IDI, PP IAI, dan MAKPI.
- 4) Melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya kualitas mutu produk obat dan makanan yang dikonsumsi dan ikut terlibat dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
- 5) Diharapkan pada penelitian lanjutan dapat menambah pemangku kepentingan yang terlibat dan mendalami karakteristik dari tiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan, sehingga mengurangi praktik lobi dalam arti negatif dalam rangka mewujudkan kebijakan yang demokratis dan pro rakyat.